

Dalam sidang BPUPK yang pertama, Soepomo menguraikan tentang syarat mutlak untuk mengadakan negara dipandang dari sudut hukum dan dari sudut formeel. Syarat yang dimaksud Soepomo antara lain adalah

- A. wilayah, rakyat, dan kedaulatan sebagai syarat mutlak berdirinya negara
- B. pemerintahan yang demokratis dan pemilu sebagai syarat mutlak berdirinya negara
- C. lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif sebagai syarat mutlak berdirinya negara
- D. kesatuan agama, adat, dan bahasa sebagai syarat mutlak berdirinya negara

Pernyataan yang paling tepat untuk menjelaskan peran Pancasila sebagai bagian penting bagi masyarakat dan negara dalam konteks dulu dan kini adalah

- A. Pancasila merupakan proyek pendidikan kebangsaan dan karakter, sehingga kehadiran materi dan mata pelajaran Pancasila menjadi bagian penting bagi negara dan masyarakat sebagai landasan berpikir dan bertindak dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
- B. Pancasila sejak awal reformasi tidak lagi menjadi dasar negara, tetapi berubah menjadi sekadar pedoman etika sosial bagi kehidupan berbangsa dan bernegara
- C. Pancasila hanya berfungsi sebagai simbol pemersatu, tanpa memiliki kekuatan sebagai sistem pengetahuan yang utuh dalam masyarakat
- D. Pancasila setelah reformasi hanya dipahami sebagai sejarah, bukan lagi sebagai cita-cita luhur bangsa dalam membangun negara Indonesia

“Pancasila sebagai dasar negara tidak dapat dilepaskan dari sistem pengetahuan sejarah bangsa Indonesia. Proses kelahirannya melalui sidang BPUPKI dan pengesahannya oleh PPKI tahun 1945 merupakan fakta sejarah yang terdokumentasi dalam risalah sidang, manuskrip, dan naskah Pembukaan UUD 1945. Fakta historis ini menjadi bagian penting dalam kurikulum pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), sehingga generasi muda dapat memahami bahwa Pancasila bukan sekadar ideologi normatif, melainkan hasil perumusan para pendiri bangsa yang memiliki landasan sejarah yang kuat. Melalui kurikulum PPKn, peserta didik diperkenalkan dengan perjalanan sejarah Pancasila dari masa perumusan hingga penerapannya dalam berbagai periode, mulai dari Revolusi Fisik, masa RIS, Demokrasi Parlementer, Orde Baru, hingga Reformasi. Dengan demikian, PPKn berperan menjembatani nilai-nilai Pancasila dengan fakta sejarah bangsa, agar pemahaman terhadap Pancasila lebih utuh, kontekstual, dan sesuai dengan realitas historis Indonesia.”

Menurut teks tersebut kurikulum PPKn berperan dalam memahami Pancasila untuk

- A. mengajarkan Pancasila hanya sebagai hafalan tanpa konteks sejarah
- B. menjembatani nilai-nilai Pancasila dengan fakta sejarah bangsa Indonesia
- C. memisahkan pendidikan sejarah dengan pendidikan ideologi
- D. menekankan aspek politik Pancasila semata

Dalam diskusi mahasiswa, seorang peserta berpendapat: "Dasar negara berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan hukum dasar negara, sehingga semua peraturan harus sesuai nilai-nilai Pancasila." Pernyataan tersebut paling sesuai dengan definisi

- A. Kaelan karena menekankan aspek filsafat moral dan kondisi ideal hukum
- B. Notonagoro karena menekankan Pancasila sebagai grand norm
- C. Hamid Attamimi karena menekankan standar hukum
- D. Jimly Asshidiqie karena menekankan cita-cita hukum

Filsafat sering disebut sebagai “cinta kebijaksanaan”. Pengertian ini menunjukkan bahwa filsafat

- A. berfokus pada usaha manusia mencari dan mencintai kebijaksanaan hidup
- B. berfokus pada aspek praktis kebijaksanaan dalam kehidupan sehari-hari
- C. terbatas pada pengetahuan empiris
- D. identik dengan kumpulan dogma yang harus diyakini

Contoh sumber sejarah yang berupa manuskrip untuk memahami proses lahirnya Pancasila adalah

- A. foto pertemuan Konferensi Meja Bundar di Den Haag
- B. risalah sidang BPUPK tanggal 29 Mei–1 Juni 1945
- C. naskah asli Pembukaan UUD 1945 hasil PPKI
- D. testimoni Moh. Hatta tentang perundingan Linggarjati

Perbedaan pandangan orde baru dengan reformasi terhadap Pancasila adalah

- A. Orde Baru menghapus Pancasila dari pendidikan, sedangkan Reformasi mengembalikannya
- B. Orde Baru menjadikan Pancasila ideologi liberal, sedangkan Reformasi menggantinya dengan ideologi sosialis
- C. Orde Baru menggunakan Pancasila sebagai asas tunggal dan alat kontrol politik, sedangkan Reformasi memulihkan Pancasila sebagai dasar negara sesuai Pembukaan UUD 1945
- D. Orde Baru sama sekali tidak menggunakan Pancasila, sedangkan Reformasi menghidupkannya kembali

Pemerintah Indonesia sedang gencar mengembangkan identitas digital tunggal (Digital ID) yang akan terhubung dengan berbagai layanan publik, seperti kesehatan, pendidikan, perpajakan, hingga bantuan sosial. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi layanan dan meminimalisasi birokrasi. Namun, sejumlah kalangan mengkritik kebijakan ini karena dikhawatirkan akan menimbulkan risiko privasi, diskriminasi teknologi terhadap kelompok rentan yang tidak terbiasa dengan sistem digital, serta potensi penyalahgunaan data oleh pihak tertentu. Sebagai ideologi negara, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar penyelenggaraan negara, tetapi juga sebagai pedoman dalam menghadapi tantangan baru yang muncul akibat perkembangan zaman. Oleh karena itu, implementasi kebijakan Digital ID harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang menekankan penghormatan martabat manusia, keadilan sosial, demokrasi, dan persatuan bangsa. Jika ditinjau dari peran Pancasila sebagai ideologi yang menjadi standar pengarah perilaku berbangsa dan bernegara, langkah paling tepat dalam menyikapi kebijakan Digital ID adalah

- A. menetapkan regulasi perlindungan data yang tegas untuk menjamin hak asasi manusia dan mencegah penyalahgunaan informasi pribadi
- B. menyediakan akses pendampingan digital bagi kelompok rentan agar tidak terjadi diskriminasi dalam memperoleh layanan publik
- C. melibatkan berbagai pemangku kepentingan melalui musyawarah terbuka sebelum kebijakan diterapkan secara nasional
- D. mengintegrasikan kebijakan Digital ID dengan tujuan keadilan sosial sehingga manfaat layanan publik dapat dirasakan merata oleh seluruh warga negara

Panitia Sembilan berhasil merumuskan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Perbedaan utama Piagam Jakarta dengan Pancasila yang disahkan PPKI 18 Agustus 1945 adalah Piagam Jakarta

- A. menempatkan sila ke-5 sebagai Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
- B. memuat sila pertama dengan rumusan "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya"
- C. menggunakan istilah "Pancasila" untuk pertama kalinya
- D. tidak memasukkan unsur agama sama sekali

Pada proses perumusan sebuah undang-undang baru mengenai pengelolaan sumber daya alam, pemerintah menekankan bahwa undang-undang tersebut harus berorientasi pada keberlanjutan lingkungan, menghormati hak-hak masyarakat adat, memperhatikan asas musyawarah dalam pengambilan keputusan, serta menjamin keadilan dalam distribusi hasil kekayaan alam bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan kasus tersebut, penerapan Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum tercermin dalam perumusan undang-undang tersebut yang

- A. berorientasi pada efisiensi ekonomi sehingga dapat bersaing di pasar global
- B. dibentuk berdasarkan asas-asas Pancasila, yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial
- C. menekankan pada kepentingan politik mayoritas tanpa memperhatikan kepentingan minoritas
- D. lebih mengutamakan kepentingan investor asing dibandingkan kepentingan rakyat Indonesia

Pemerintah berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan sosial. Dalam kebijakannya, pemerintah mendorong pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal, memberikan bantuan modal bagi UMKM, dan memastikan pemerataan hasil pembangunan agar tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu. Berdasarkan kasus tersebut, penerapan Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi tercermin dalam kebijakan pemerintah yang

- A. diarahkan untuk kepentingan seluruh rakyat, bukan hanya kelompok tertentu
- B. lebih menekankan keuntungan materi tanpa memperhatikan aspek keadilan
- C. sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar bebas
- D. hanya difokuskan pada daerah perkotaan yang potensial menghasilkan devisa.

Pidato Sukarno pada 1 Juni 1945 memperkenalkan lima prinsip dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Rumusan ini kemudian diolah kembali dalam Piagam Jakarta (22 Juni 1945) dan akhirnya disahkan dalam Pembukaan UUD 1945 (18 Agustus 1945). Makna dari rangkaian peristiwa tersebut adalah perumusan Pancasila

....

- A. berlangsung melalui proses musyawarah, kompromi, dan penyesuaian sehingga diterima semua golongan
- B. menunjukkan lemahnya konsistensi para pendiri bangsa karena sering berubah-ubah
- C. membuktikan bahwa hanya Sukarno yang mampu memberikan rumusan yang tepat dan final
- D. menegaskan bahwa dasar negara bersifat fleksibel sehingga bisa selalu diubah sesuai situasi politik

Peran historis Pancasila pada masa Demokrasi Parlementer paling tepat dijelaskan oleh pernyataan Pancasila

- A. dijadikan asas tunggal melalui TAP MPR No. II/MPR/1978 yang mewajibkan penataran P4
- B. tidak diakui sebagai dasar negara karena berlakunya UUD Sementara 1950
- C. menjadi sumber dorongan politik untuk kembali ke UUD 1945 setelah Konstituante gagal, yang berpuncak pada Dekrit Presiden 5 Juli 1959
- D. ditetapkan sebagai salah satu dari “empat pilar kebangsaan” yang disosialisasikan MPR

Sidang PPKI pada 18 Agustus 1945 mengesahkan UUD 1945 beserta Pancasila dalam Pembukaan sebagai dasar negara. Salah satu keputusan penting adalah mengubah rumusan sila pertama Piagam Jakarta menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa." Aspek mendasar yang ditunjukkan oleh peristiwa tersebut adalah Pancasila

- A. diterima sebagai dasar negara melalui kesepakatan kolektif dan final
- B. hanya berlaku bagi kelompok mayoritas, sementara minoritas tidak diakui
- C. tidak mengalami perubahan sama sekali sejak pertama kali dirumuskan
- D. baru diperdebatkan setelah proklamasi karena sebelumnya belum ada gagasan dasar negara

Ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan pembangunan ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, fungsi Pancasila yang paling relevan untuk dianalisis adalah Pancasila

- A. hanya sebagai simbol yang diwariskan oleh para pendiri bangsa Indonesia
- B. sebagai falsafah negara yang menjadi dasar pembangunan masyarakat adil dan makmur
- C. hanya berfungsi sebagai panduan dalam tata cara hidup bermasyarakat
- D. sekadar dijadikan slogan dalam membangkitkan semangat perjuangan rakyat

Dalam paradigma keilmuan, positivisme menekankan kebenaran tunggal berdasarkan fakta empiris (*single truth*). Jika penelitian di Indonesia hanya menggunakan paradigma positivisme, kelemahan yang akan muncul adalah

- A. penelitian cenderung mengabaikan dimensi nilai dan moral yang hidup dalam masyarakat Indonesia
- B. penelitian menghasilkan data yang tidak dapat diuji kebenarannya secara ilmiah
- C. penelitian tidak dapat dilakukan pada bidang sosial karena hanya cocok untuk ilmu eksakta
- D. penelitian selalu bertentangan dengan teori yang berkembang di masyarakat global

Sebuah kasus besar korupsi dana bantuan sosial mencuat ke publik. Dana yang seharusnya digunakan untuk membantu masyarakat miskin terdampak pandemi justru diselewengkan oleh pejabat tinggi. Praktik ini bukan hanya merugikan rakyat kecil secara ekonomi, tetapi juga meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dari perspektif filsafat Pancasila, implementasi sila-sila dalam kasus ini paling tepat dianalisis sebagai

- A. substansi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara karena menyangkut legitimasi moral penyelenggara negara
- B. realitas, karena menunjukkan masih jauhnya praktik kehidupan dari cita-cita Pancasila
- C. nilai, karena korupsi mencederai prinsip keadilan yang terkandung dalam sila kelima
- D. substansi, realitas, dan nilai sekaligus karena ketiganya tercermin dalam kasus tersebut

Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat Indonesia semakin aktif mengawasi kinerja pemerintah, termasuk melalui media sosial dan lembaga-lembaga independen seperti KPK dan Ombudsman. Salah satu contoh yang menonjol adalah pengungkapan kasus korupsi di sektor pelayanan publik, yang memicu desakan agar pemerintah menerapkan prinsip *good governance* seperti akuntabilitas, transparansi, dan keadilan secara lebih tegas. Dalam konteks tersebut, bagaimana nilai-nilai Pancasila tercermin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara?

- A. Pancasila menuntut praktik penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- B. Pancasila membenarkan praktik monopoli dan liberalisme pasar tanpa regulasi negara.
- C. Pancasila mengabaikan prinsip akuntabilitas demi mempercepat pembangunan ekonomi nasional.
- D. Pancasila menekankan dominasi kelompok tertentu atas kepentingan bangsa secara keseluruhan.

Menilik sejarah lahirnya Pancasila, dalam sidang BPUPK dan perumusan Piagam Jakarta menunjukkan adanya tarik-menarik antara kepentingan politik, agama, dan persatuan nasional. Perubahan tujuh kata dalam Piagam Jakarta menjadi momen penting yang memperlihatkan bagaimana para pendiri bangsa menempatkan kepentingan persatuan di atas kepentingan kelompok. Namun, dinamika itu tidak mengurangi nilai Pancasila sebagai hasil permenungan mendalam yang bersumber dari budaya, tradisi, dan pengalaman historis bangsa Indonesia. Di era kini, politik identitas seringkali menimbulkan perpecahan sosial. Filsafat Pancasila dapat dijadikan landasan untuk merespons tantangan persatuan bangsa di era kontemporer dengan cara

- A. menjadikan Pancasila sebagai pemersatu karena lahir dari kompromi politik yang membuktikan kemampuan bangsa menempatkan persatuan di atas kepentingan kelompok
- B. memahami Pancasila sebagai hasil refleksi budaya bangsa yang telah hidup jauh sebelum 1945 sehingga dapat menjadi fondasi kuat menghadapi polarisasi sosial
- C. menguatkan Pancasila sebagai dasar negara yang secara formal disahkan dalam Pembukaan UUD 1945, sehingga memiliki legitimasi hukum tertinggi menjaga persatuan
- D. mengaktualisasikan Pancasila dengan menekankan nilai musyawarah sebagai roh demokrasi bangsa, yang sejak awal menjadi semangat kompromi dalam sidang BPUPK

Di Yogyakarta, masyarakat dari berbagai agama hidup berdampingan. Saat hari besar keagamaan, mereka saling membantu menjaga keamanan, parkir, hingga kebersihan lingkungan, tanpa memandang perbedaan keyakinan. Dari perspektif sosiologis, Pancasila menjadi dasar negara karena

- A. hasil pengalaman kolektif masyarakat dalam mengamalkan nilai toleransi
- B. semata-mata diturunkan dari sistem nilai bangsa lain agar efektif
- C. tidak memiliki hubungan dengan praktik sosial budaya masyarakat
- D. hanya berfungsi sebagai aturan hukum formal

Dalam pelaksanaan Pemilu, sering kali muncul dinamika politik yang sarat dengan isu SARA, penyebaran hoaks, dan penggunaan politik identitas. Fenomena ini memicu kekhawatiran akan terjadinya disintegrasi bangsa.

Bagaimana seharusnya Pancasila diposisikan dalam menghadapi dinamika politik tersebut dari sudut pandang politis?

- A. Sebagai dasar pembenaran untuk mengatur pembatasan terhadap kebebasan berpendapat yang berlebihan.
- B. Sebagai landasan moral dalam membangun proses politik yang adil dan menjunjung tinggi persatuan.
- C. Sebagai norma hukum yang dapat menggantikan seluruh aturan teknis dalam pemilu.
- D. Sebagai konsep ideal yang lebih cocok diterapkan dalam pendidikan daripada praktik politik langsung.

Di sebuah perusahaan milik negara, perempuan sering diabaikan untuk posisi strategis meskipun memiliki kualifikasi setara dengan laki-laki. Dalam rekrutmen, perempuan dianggap kurang pantas memimpin karena budaya patriarki masih kuat. Akibatnya, kesempatan kerja dan pengembangan karier bagi perempuan menjadi terbatas. Analisis sila-sila Pancasila terhadap fenomena ini adalah melanggar sila

- A. Persatuan Indonesia karena mengabaikan potensi seluruh warga bangsa
- B. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab karena menolak kesetaraan martabat manusia
- C. Kerakyatan karena partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dihambat
- D. Keadilan Sosial karena akses pemerataan kesempatan kerja tidak diberikan setara

Dalam membahas gejala sosial, seorang peneliti menyatakan bahwa hanya fakta teramati yang bisa dijadikan dasar pengetahuan, sementara nilai atau keyakinan dianggap subjektif. Pandangan ini merupakan ciri

- A. positivisme, karena menganggap pengetahuan sah hanya berdasarkan fakta empiris
- B. pragmatisme, karena kebenaran bergantung pada manfaat praktis
- C. aristotelianisme, karena memandang realitas berdasarkan tujuan (*telos*) tiap hal
- D. postmodernisme, karena menolak klaim kebenaran yang bersifat mutlak

Dalam konteks kehidupan masyarakat, ideologi dapat dipahami sebagai seperangkat nilai dasar yang menjadi pedoman bersama. Menurut salah satu ahli, pengertian tersebut dikemukakan oleh

- A. Sastrapratedja
- B. Mubyarto
- C. Soerjanto
- D. Destutt de Tracy

Piagam Jakarta awalnya ditetapkan pada 22 Juni 1945, lalu disempurnakan hingga menjadi Pembukaan UUD NKRI 1945. Dari aspek historis, hal ini menunjukkan bahwa

....

- A. Pancasila sejak awal ditetapkan sebagai UUD NKRI 1945
- B. Pancasila merupakan hasil pemikiran tunggal Mohammad Yamin
- C. Piagam Jakarta tidak ada kaitannya dengan Pancasila
- D. Pancasila lahir secara evolutif melalui proses perdebatan dan kompromi

Pembukaan UUD 1945 dan TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 (Jo Tap MPR No. V/1973 dan Tap MPR No. IX/1978) menjadi dasar yuridis Pancasila sebagai dasar negara, menunjukkan bahwa Pancasila

- A. mendapat legitimasi hukum ganda yang menunjukkan supremasi hukum dari Pancasila
- B. bergantung ketetapan politik sebagai dasar negara karena tercatat dalam Ketetapan MPR
- C. tidak cukup kuat kedudukannya tanpa UUD 1945
- D. kedudukannya berubah-ubah bergantung pada kondisi politik Indonesia

Di era digital saat ini, maraknya penyebaran berita palsu (hoaks) dan ujaran kebencian di media sosial menimbulkan tantangan serius bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Fenomena ini memicu berbagai reaksi dari masyarakat dan pemerintah dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan.

Dalam situasi tersebut, bagaimana mahasiswa dapat menganalisis dinamika dan tantangan implementasi Pancasila sebagai dasar falsafah negara secara kritis dan tepat?

- A. Pancasila mengamanatkan perlunya penguatan nilai-nilai toleransi dan persatuan sebagai upaya menghadapi ancaman disintegrasi akibat hoaks dan ujaran kebencian.
- B. Pancasila membolehkan pembatasan kebebasan berpendapat tanpa batas untuk mencegah penyebaran informasi negatif di masyarakat.
- C. Pancasila sebagai dasar falsafah negara hanya bersifat normatif dan tidak relevan dalam mengatasi masalah-masalah aktual seperti hoaks dan ujaran kebencian.
- D. Pancasila menginstruksikan agar pemerintah mengutamakan kepentingan politik tertentu dalam menyelesaikan masalah kebangsaan yang muncul.

Makna filsafat sebagai sistem adalah

- A. pemikiran filsafat bersifat integral, tiap unsur saling berhubungan membentuk kesatuan utuh
- B. pemikiran filsafat hanya berfungsi praktis untuk pemecahan masalah sehari-hari
- C. filsafat semata-mata tradisi lokal yang khas suatu bangsa
- D. filsafat terdiri atas teori-teori yang berdiri sendiri-sendiri

Di suatu negara, pemerintah mengambil alih hampir semua sektor produksi. Kepemilikan pribadi atas tanah dan modal dihapuskan. Semua sumber daya dikelola negara untuk kepentingan rakyat. Sistem ini mencerminkan ideologi

- A. komunisme
- B. kapitalisme
- C. liberalisme
- D. feodalisme

Perkembangan teknologi komunikasi melahirkan media sosial yang memudahkan akses informasi. Dari sisi ilmu pengetahuan, ini dianggap kemajuan; dari sisi agama, muncul kritik karena menimbulkan penyebaran hoaks dan degradasi moral. Peran filsafat dalam kasus ini adalah

- A. memberikan kerangka berpikir rasional untuk menghubungkan etika agama dengan manfaat teknologi
- B. menolak media sosial karena dampaknya dianggap hanya negatif
- C. mengabaikan moralitas dan lebih mengutamakan kebebasan teknologi
- D. menyamakan pandangan agama dengan hasil penelitian ilmiah tanpa kritik

Seiring berkembangnya *Artificial Intelligence* (AI) dalam riset medis, muncul pertanyaan apakah keputusan AI dapat dianggap sebagai pengetahuan ilmiah yang sah. Fungsi filsafat sebagai sistem pengetahuan dalam hal ini adalah

- A. menentukan algoritma yang dipakai dalam teknologi AI
- B. menggantikan peran ilmu dengan keyakinan metafisik
- C. menelaah secara kritis landasan epistemologis dan validitas pengetahuan yang dihasilkan
- D. menyamaratakan AI dengan wahyu agama tanpa perbedaan

Arus budaya digital global masuk melalui media sosial. Pemerintah mendorong literasi digital yang menekankan etika, kesopanan, dan gotong royong komunitas. Kebijakan ini menunjukkan bahwa Pancasila sebagai ideologi terbuka karena

- A. menyerap pengaruh luar tanpa kehilangan jati diri bangsa
- B. menolak seluruh bentuk budaya asing demi kemurnian lokal
- C. hanya berlaku dalam ranah hukum formal negara
- D. mengutamakan budaya luar daripada nilai-nilai bangsa

Di sebuah wilayah pesisir, perubahan sosial terjadi sangat cepat akibat masuknya investasi asing. Masyarakat setempat merasakan ketimpangan ekonomi, sebagian diuntungkan sementara sebagian lain tersingkir. Kondisi ini menimbulkan ketegangan sosial bahkan potensi konflik antarwarga. Situasi tersebut termasuk dalam kategori Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) terhadap ketahanan nasional. Dalam kasus tersebut Pancasila berperan sebagai paradigma pembangunan ketahanan nasional sebagai

- A. landasan ideologis yang memberikan arah dalam mengatasi AGHT guna memperkuat kedaulatan, keutuhan, dan kelangsungan hidup bangsa
- B. simbol persatuan bangsa tanpa relevansi dalam menghadapi perubahan sosial dan ketimpangan ekonomi
- C. aturan yang membatasi kebebasan masyarakat agar tidak menimbulkan ketegangan akibat perubahan sosial
- D. dasar hukum formal tanpa memberikan nilai praktis dalam menghadapi konflik sosial dan politik

Pancasila dalam kebijakan pembangunan yang merata dan nilai kemanusiaan diterapkan dalam sikap toleransi. Hal ini menunjukkan manfaat praktis dari nilai Pancasila. Contoh tersebut merupakan landasan Pancasila.

- A. ontologis
- B. epistemologis
- C. aksiologis
- D. historis

Fenomena maraknya pinjaman online ilegal (pinjol) yang menjerat masyarakat dengan bunga tinggi menimbulkan banyak korban. Tantangan implementasi Pancasila di bidang ekonomi dari kasus tersebut adalah

- A. lemahnya kesadaran hukum masyarakat sehingga menurunkan kualitas keadilan sosial
- B. menurunnya minat masyarakat dalam berwirausaha karena terjebak utang digital
- C. tidak meratanya pembangunan infrastruktur sehingga menghambat akses ekonomi daerah
- D. kurangnya lapangan pekerjaan formal yang mendorong masyarakat mencari pinjaman cepat

Dalam rangka pemerataan pendidikan, pemerintah membangun sekolah baru di daerah pedalaman. Namun, lokasi pembangunan awal direncanakan di lahan milik pesantren. Setelah berdialog dengan pengasuh pesantren, pemerintah memutuskan untuk memindahkan lokasi sekolah ke tanah lain yang tetap strategis agar pesantren tidak terganggu dan fungsi ibadah tetap berjalan. Kasus tersebut menunjukkan analisis implementasi nilai ketuhanan dalam paradigma pembangunan, yaitu

- A. pemerintah mengutamakan pembangunan sekolah tanpa peduli pada eksistensi pesantren
- B. dialog dengan pengasuh pesantren menunjukkan penghormatan terhadap nilai keagamaan dalam perencanaan pembangunan
- C. pembangunan sekolah di pesantren dianggap tidak masalah karena keduanya sama-sama untuk tujuan pendidikan
- D. pemindahan lokasi hanya untuk menghindari konflik sosial, bukan cerminan nilai ketuhanan

Seorang peneliti mengkaji Pancasila dengan pendekatan yuridis, yaitu melihat kedudukannya sebagai dasar hukum dalam peraturan perundang-undangan. Kajian tersebut termasuk dalam kategori

- A. objek material Pancasila
- B. objek formal Pancasila
- C. nilai instrumental Pancasila
- D. nilai fundamental Pancasila

Pemerintah membangun jalur kereta api cepat yang menghubungkan Jakarta–Bandung–Surabaya. Pembangunan ini melibatkan pemerintah provinsi dan masyarakat setempat, dengan tujuan mempercepat mobilitas barang, jasa, dan orang. Dalam perspektif implementasi sila ketiga Pancasila: Persatuan Indonesia, kebijakan tersebut dapat dianalisis sebagai

- A. upaya memperkuat persatuan antarwilayah melalui konektivitas transportasi nasional
- B. proyek yang hanya menguntungkan kota besar sehingga menimbulkan kecemburuan sosial
- C. bentuk dominasi pemerintah pusat terhadap daerah karena proyek ditentukan sepihak
- D. sarana ekonomi semata tanpa kontribusi pada persatuan bangsa

Pemerintah memberikan izin pembangunan pabrik tekstil besar di wilayah pedesaan untuk membuka lapangan kerja baru. Namun, pembangunan ini berpotensi menimbulkan pencemaran sungai yang merupakan sumber air utama warga. Sebagian warga merasa khawatir kesehatannya terancam, tetapi aspirasi mereka kurang didengar dalam musyawarah. Dalam perspektif implementasi sila kedua Pancasila: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, sikap yang seharusnya diambil adalah

- A. menjamin hak masyarakat atas lingkungan sehat serta melibatkan warga dalam proses pengambilan keputusan
- B. menekankan manfaat besar pembangunan yang akan meningkatkan perekonomian daerah
- C. meminta masyarakat beradaptasi dengan perubahan karena pembangunan tidak bisa dihentikan
- D. mengutamakan kepentingan investor sebagai motor penggerak pembangunan nasional

Belakangan ini marak fenomena *post-truth*, yaitu kondisi ketika opini dan emosi lebih mudah dipercaya daripada fakta objektif. Hal ini tampak di media sosial, misalnya penyebaran hoaks politik menjelang pemilu. Informasi yang dipelintir sering digunakan untuk menyerang lawan politik, menimbulkan polarisasi masyarakat, bahkan mengikis rasa kebersamaan. Situasi tersebut menegaskan ruang lingkup Pendidikan Pancasila pada aspek ideologi dapat dipahami bahwa Pancasila

- A. dipandang sebagai identitas kebangsaan yang melekat sejak lahirnya bangsa Indonesia dan menjadi dasar persatuan dalam menghadapi perbedaan pandangan politik
- B. dipahami sebagai ideologi terbuka yang berfungsi sebagai filter nilai dalam menghadapi arus globalisasi, termasuk fenomena hoaks, manipulasi informasi, dan polarisasi digital
- C. dimaknai terutama sebagai hasil historis perumusan dasar negara tahun 1945, dengan penekanan pada proses lahirnya, sehingga lebih bersifat retrospektif
- D. dilihat sebagai dasar hukum yang memberi arah pada kelembagaan negara, sehingga perannya lebih dominan pada aspek normatif kelembagaan ketimbang dinamika masyarakat

Dalam perjalanan sejarah Indonesia, Pancasila dirumuskan sebagai dasar negara yang berisi lima asas pokok. Secara etimologis, istilah "Pancasila" berasal dari bahasa Sanskerta. Berikut pengertian yang tepat tentang Pancasila, yaitu

- A. dasar filsafat dan ideologi negara Indonesia., "panca" berarti "lima" dan "sila" berarti "prinsip" atau "asas"
- B. dasar filsafat negara Republik Indonesia., "panca" berarti "asas" dan "sila" berarti "lima"
- C. ideologi bangsa Indonesia., "panca" berarti "prinsip" dan "sila" berarti "lima"
- D. pedoman hidup bangsa Indonesia., "panca" berarti "prinsip" dan "sila" berarti "asas"

Di sebuah kampus, mahasiswa dari keluarga kurang mampu mendapatkan fasilitas KIP Kuliah untuk menunjang studi. Namun, ada juga mahasiswa yang tidak benar-benar memenuhi syarat tetapi tetap mendapatkannya karena memanipulasi data. Berdasarkan kasus tersebut, implementasi prinsip sila ke-5 Pancasila tampak

- A. sepenuhnya berhasil karena semua mahasiswa yang membutuhkan mendapat bantuan
- B. sebagian berhasil karena mahasiswa kurang mampu mendapat dukungan, tetapi muncul masalah ketidakadilan akibat manipulasi data
- C. gagal sepenuhnya karena ada mahasiswa yang tidak berhak tetap menerima fasilitas
- D. tidak relevan dengan sila ke-5 Pancasila karena program pendidikan tidak termasuk aspek keadilan sosial

Fenomena yang sering dijumpai di kalangan mahasiswa adalah rendahnya tingkat partisipasi dalam berbagai aktivitas sosial, budaya, politik, maupun pendidikan. Kondisi ini dapat menghambat peran mahasiswa sebagai agen perubahan yang diharapkan mampu mendorong terciptanya keadilan sosial, kesejahteraan, dan demokrasi yang sehat. Berdasarkan kasus tersebut, apa urgensi Pendidikan Pancasila bagi mahasiswa?

- A. Memperkenalkan dasar negara tanpa menuntut penerapannya dalam kehidupan nyata
- B. Agar mahasiswa sekadar mengetahui sejarah bangsa dan perkembangan politik Indonesia
- C. Mendorong mahasiswa menjadi warga negara aktif dan partisipatif melalui keterlibatan dalam berbagai bidang
- D. Semata-mata sebagai syarat formal dalam kurikulum perguruan tinggi tanpa relevansi dengan praktik demokrasi

Ketika banjir melanda sebagian wilayah Kalimantan, warga dari berbagai latar belakang etnis dan agama bekerjasama mendirikan dapur umum dan posko bantuan. Mereka saling membantu tanpa membedakan suku, agama, atau budaya. Dukungan juga datang dari warga daerah lain sebagai bentuk solidaritas nasional. Berdasarkan kasus tersebut, tujuan Pendidikan Pancasila yang paling tepat adalah

- A. sebagai simbol negara tanpa memberikan dampak nyata pada masyarakat
- B. digunakan hanya dalam bidang hukum negara tanpa penerapan dalam kehidupan sosial
- C. memainkan peran penting dalam mewujudkan persatuan, keadilan, dan keberagaman dalam masyarakat Indonesia
- D. dipahami hanya sebatas hafalan lima sila yang diucapkan tanpa praktik nyata

Dalam musyawarah pemuda karang taruna, seluruh anggota diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat sebelum mengambil keputusan bersama terkait program kerja. Keputusan yang dihasilkan pun diterima dengan baik oleh semua pihak. Jika dianalisis berdasarkan sila keempat Pancasila, dampak positif dari kondisi tersebut adalah

- A. terbangunnya sikap saling menghargai karena semua pendapat diperhatikan
- B. meningkatnya rasa kecewa karena tidak semua usulan bisa diterima
- C. terjadinya perpecahan karena proses musyawarah memakan waktu lama
- D. hilangnya semangat gotong royong karena keputusan hanya menguntungkan sebagian pihak

Dalam sidang BPUPK, Moh. Yamin berpidato mengenai asas dan dasar negara kebangsaan Republik Indonesia. Menurut Yamin, kemerdekaan dijadikan konsep kedaulatan ke dalam dan kedaulatan ke luar. Berikut ini yang dimaksud dengan kedaulatan ke luar menurut gagasan Yamin, yaitu

- A. negara tunduk pada dominasi negara lain sebagai bentuk perlindungan internasional
- B. negara wajib mengikuti aturan Atlantic Charter dalam hubungan luar negeri
- C. negara bebas mengatur pertalian dan menjalin hubungan dengan negara lain, bukan dalam bentuk dominion, protektorat, atau mandat
- D. negara hanya boleh bekerja sama dengan bangsa Timur sebagai sesama negara berkembang

Perjalanan Pancasila dalam lintasan sejarah Indonesia memperlihatkan dinamika cara pandang masyarakat terhadapnya. Pada era Orde Baru, Pancasila diajarkan secara seragam melalui berbagai jalur pendidikan dan program kenegaraan. Namun, setelah Reformasi 1998, muncul berbagai pandangan berbeda terhadap Pancasila. Banyak kalangan menilai bahwa generasi muda cenderung kurang memahami akar sejarah Pancasila, sementara sebagian lain beranggapan bahwa Pancasila harus dimaknai sesuai dengan perkembangan zaman. Di tengah perubahan sosial, ekonomi, dan politik, terdapat pergeseran pemaknaan Pancasila: dulu diposisikan sebagai dasar pembentukan persatuan dan cita-cita bernegara, kini dipahami dalam kerangka implementasi nilai dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting: bagaimana sebenarnya perbedaan cara pandang terhadap Pancasila antara masa lalu dan masa kini.

Berdasarkan bacaan di atas, pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan perbedaan pemahaman Pancasila dulu dan kini adalah

- A. pemahaman Pancasila dulu diarahkan untuk menjawab persoalan dan tantangan zaman terhadap jati diri, identitas nasional, dan cita-cita bernegara dan berbangsa, terutama dalam mendirikan negara Indonesia yang merdeka
- B. pemahaman Pancasila dulu lebih menekankan pada aspek sejarah perjuangan bangsa, sedangkan pemahaman kini lebih diarahkan pada perbedaan tafsir di masyarakat yang semakin beragam
- C. pemahaman Pancasila dulu menempatkan Pancasila sebagai dasar persatuan bangsa, sedangkan kini hanya dipandang sebagai nilai formal yang tidak memiliki fungsi dalam kehidupan bermasyarakat
- D. pemahaman Pancasila dulu lebih bersifat normatif karena disampaikan oleh pemerintah secara top-down, sedangkan pemahaman kini bersifat praktis sesuai kondisi individu atau kelompok

Pancasila dianggap tidak bisa dilepaskan dari sistem pengetahuan sejarah bangsa Indonesia karena Pancasila

- A. hanya diwariskan melalui tradisi lisan para tokoh bangsa
- B. lahir dari sidang BPUPKI dan PPKI yang terdokumentasi secara historis
- C. sepenuhnya diadopsi dari ideologi asing
- D. hanya merupakan doktrin politik tanpa landasan sejarah

Dalam sebuah kuliah, dosen menyatakan, "Pancasila sebagai dasar negara harus dipahami sebagai cita-cita hukum yang menjadi arah penyusunan hukum nasional."

Pemahaman tersebut, sesuai dengan definisi Pancasila sebagai dasar negara oleh

- A. Kaelan karena menekankan aspek filsafat moral dan kondisi ideal hukum
- B. Notonagoro karena menekankan Pancasila sebagai *grand norm*
- C. Hamid Attamimi karena menekankan standar hukum
- D. Jimly Asshidiqie karena menekankan cita-cita hukum

Objek kajian filsafat mencakup objek material dan formal. Pernyataan yang paling tepat adalah

- A. objek material adalah segala sesuatu yang ada, sedangkan objek formal adalah cara memandangnya secara radikal dan mendasar
- B. objek material adalah metode ilmiah, sedangkan objek formal adalah gejala empiris yang dapat diukur
- C. objek material adalah pengalaman inderawi manusia, sedangkan objek formal adalah tafsir ilmiah atas pengalaman itu
- D. objek material adalah segala sesuatu yang ada, sedangkan objek formal adalah metode eksperimen laboratorium

Perhatikan sumber dokumen sejarah berikut!

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1) Naskah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 | 4) Kesaksian Tokoh tentang G30S/PKI |
| 2) Risalah Sidang MPRS 1966 | 5) Kajian Akademik Analisis Peran MPRS dalam Transisi Orde Lama dan Orde Baru |
| 3) Dokumentasi Sidang MPRS | 6) Teks Proklamasi 1945 |

Untuk memahami peran Pancasila pada masa MPRS, dokumen sejarah yang termasuk sumber primer adalah

- A. 1, 2, dan 3
- B. 1, 2, dan 6
- C. 2, 4, dan 5
- D. 3, 4, dan 5

Perbedaan fungsi Pancasila pada masa Demokrasi Parlementer dibanding masa RIS adalah

- A. pada masa Parlementer, Pancasila dijadikan dasar penataran P4 yang bersifat wajib
- B. pada masa Parlementer, Pancasila dipakai untuk melegitimasi sistem multipartai yang liberal
- C. pada masa Parlementer, Pancasila menjadi dasar dorongan kembali ke UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959
- D. pada masa Parlementer, Pancasila diganti sementara dengan ideologi Marxisme-Leninisme

Di sebuah daerah, aktivitas pertambangan nikel menimbulkan kerusakan lingkungan yang berdampak pada sumber air masyarakat sekitar. Pemerintah daerah menghadapi dilema: di satu sisi, investasi tambang memberikan pemasukan besar bagi daerah dan membuka lapangan kerja; di sisi lain, masyarakat setempat mengalami penurunan kualitas hidup akibat pencemaran. Sejumlah organisasi lingkungan menuntut penghentian operasi tambang, sementara pemerintah pusat menekankan pentingnya mineral nikel untuk mendukung transisi energi nasional. Dalam kerangka Pancasila sebagai ideologi negara, kebijakan pertambangan seharusnya menyeimbangkan kepentingan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, hak asasi manusia, serta keadilan sosial. Ditinjau dari peran Pancasila sebagai ideologi yang menjadi pedoman dasar kehidupan berbangsa, pendekatan kebijakan yang paling tepat dalam kasus pertambangan tersebut adalah

- A. mengutamakan keadilan sosial dengan menjamin kompensasi, pemulihan lingkungan, dan distribusi manfaat yang adil bagi masyarakat lokal
- B. menegakkan prinsip demokrasi permusyawaratan dengan melibatkan masyarakat lokal, perusahaan, dan pemerintah dalam pengambilan keputusan
- C. mengedepankan penghormatan martabat manusia dengan memastikan hak masyarakat atas lingkungan sehat dan air bersih tetap terlindungi
- D. mengarahkan kebijakan pertambangan agar selaras dengan tujuan pembangunan nasional, yaitu meningkatkan kesejahteraan umum tanpa merusak persatuan bangsa

Bandingkan perbedaan konteks antara sidang BPUPK I (29 Mei – 1 Juni 1945) dan sidang PPKI (18 Agustus 1945). Pernyataan yang paling tepat adalah

- A. sidang BPUPK I fokus pada penyusunan UUD, sedangkan sidang PPKI fokus pada gagasan dasar negara
- B. sidang BPUPK I menghasilkan Pancasila final, sedangkan sidang PPKI hanya mengesahkan proklamasi
- C. sidang BPUPK I masih berupa gagasan awal dasar negara, sedangkan sidang PPKI mengesahkan Pancasila final dalam UUD 1945
- D. sidang BPUPK I dan sidang PPKI sama-sama menetapkan Pancasila sebagai dasar negara tanpa perubahan apapun

Rancangan undang-undang tentang ketenagakerjaan mengatur bahwa pekerja berhak atas upah layak, jaminan sosial, perlindungan keselamatan kerja, serta hak untuk berserikat demi memperjuangkan kesejahteraan. Berdasarkan pernyataan tersebut, bagaimana penerapan Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum tercermin dalam undang-undang tersebut?

- A. Undang-undang hanya memihak pada kepentingan pengusaha.
- B. Undang-undang menjamin hak-hak pekerja sesuai prinsip Kemanusiaan dan Keadilan Sosial.
- C. Undang-undang membatasi kebebasan pekerja untuk berserikat.
- D. Undang-undang hanya berfokus pada peningkatan produksi tanpa memperhatikan kesejahteraan pekerja.

Pemerintah memberikan dukungan modal dan pelatihan kepada koperasi nelayan agar mampu meningkatkan produksi dan kesejahteraan anggotanya. Dalam pelaksanaannya, koperasi dikelola secara gotong royong, tidak ada pihak yang mendominasi, dan keuntungan dibagikan untuk kepentingan bersama seluruh anggota. Dari kasus tersebut, ciri sistem ekonomi Pancasila yang tampak adalah

- A. kegiatan ekonomi dilakukan oleh masyarakat melalui koperasi dengan asas kekeluargaan untuk kepentingan bersama
- B. kegiatan ekonomi sepenuhnya dijalankan oleh individu dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi tanpa memperhatikan kepentingan umum
- C. seluruh kegiatan ekonomi diatur secara penuh oleh negara tanpa memberikan ruang bagi peran masyarakat dan swasta
- D. perekonomian dijalankan oleh pihak swasta yang memegang dominasi penuh dalam kegiatan produksi dan distribusi

Rumusan sila pertama dalam Piagam Jakarta berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Namun, pada 18 Agustus 1945 diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa.” Makna perubahan rumusan ini adalah bahwa Pancasila

- A. menempatkan semangat persatuan bangsa di atas kepentingan kelompok tertentu demi menjaga keutuhan nasional
- B. berusaha membatasi ruang kebebasan beragama agar sesuai dengan tafsir mayoritas
- C. menegaskan pengaruh nilai-nilai sekuler dalam dasar negara Indonesia
- D. membuktikan bahwa kompromi yang dihasilkan hanya bersifat sementara dan mudah berubah

Perbedaan peran historis Pancasila pada masa Orde Baru dan Reformasi adalah pada Orde Baru, Pancasila

- A. difungsikan sebagai asas tunggal dan alat kontrol politik; sedangkan Reformasi kedudukannya asli sebagai dasar negara
- B. tidak digunakan sama sekali; sedangkan Reformasi menghidupkan kembali nilai-nilainya
- C. berfungsi sebatas semboyan negara; sedangkan Reformasi menghapus Pancasila dari pendidikan
- D. diubah menjadi ideologi liberal; sedangkan Reformasi menggantinya dengan ideologi sosialis

Pada sidang BPUPK tanggal 1 Juni 1945, Sukarno menyampaikan pidato tentang dasar negara yang ia sebut *Panca Sila*. Gagasan ini kemudian menjadi titik temu berbagai usulan anggota sidang mengenai dasar negara Indonesia merdeka. Pernyataan yang paling tepat untuk menggambarkan makna peristiwa tersebut adalah

- A. Pancasila lahir secara resmi pada 1 Juni 1945 dan langsung sah menjadi dasar negara
- B. Pancasila hasil rumusan pribadi Sukarno tanpa melibatkan pandangan tokoh bangsa lain
- C. Peristiwa 1 Juni 1945 menunjukkan fase perumusan Pancasila dengan penyampaian gagasan dasar negara secara sistematis
- D. Pancasila pada awalnya hanya menjadi simbol politik tanpa dasar filosofis yang jelas

Jika muncul fenomena menurunnya moralitas bangsa akibat pengaruh teknologi dan media sosial, maka Pancasila harus

- A. diposisikan hanya sebagai aturan tertulis yang bersifat administratif
- B. berfungsi sebagai sumber inspirasi dan kekuatan moral dalam bertindak
- C. hanya digunakan untuk mengatur hubungan antar lembaga negara
- D. difungsikan sebatas alat politik dalam persaingan antar partai politik

Seorang ilmuwan sedang mengembangkan vaksin baru untuk penyakit menular. Dalam uji klinik, ada tekanan dari perusahaan farmasi untuk mempercepat distribusi tanpa melakukan uji keamanan penuh, meski berpotensi membahayakan masyarakat. Pernyataan yang paling tepat menggambarkan Pancasila sebagai paradigma keilmuan adalah

- A. ilmuwan dapat mempercepat distribusi vaksin demi keuntungan ekonomi dan prestise global
- B. pengembangan vaksin harus tetap mematuhi nilai-nilai Pancasila, menempatkan keselamatan masyarakat dan keadilan sosial sebagai prioritas
- C. Pancasila hanya relevan sebagai latar sejarah pengembangan ilmu di Indonesia, tidak terkait praktik medis
- D. ilmuwan dapat mengabaikan etika lokal selama memenuhi standar internasional

Sistem pendidikan nasional sering dikritik karena lebih menekankan aspek kognitif dan pencapaian akademik, sementara nilai moral, karakter, dan gotong royong terabaikan. Akibatnya, banyak lulusan berprestasi secara intelektual tetapi lemah dalam empati dan kepedulian sosial. Dari perspektif filsafat Pancasila, implementasi sila-sila dalam kasus ini paling tepat dianalisis sebagai

- A. substansi, karena pendidikan adalah sarana fundamental dalam mewujudkan cita-cita bangsa
- B. nilai, karena pendidikan seharusnya menanamkan kemanusiaan dan keadilan sebagai prinsip hidup
- C. realitas, karena praktik pendidikan masih jauh dari tujuan Pancasila
- D. nilai dan realitas sekaligus, sebab kedua aspek tersebut tercermin

Pemerintah Indonesia menolak penerapan liberalisme ekonomi yang menekankan kebebasan mutlak individu tanpa memperhatikan kepentingan kolektif. Sebagai gantinya, Indonesia menegakkan prinsip keadilan sosial dengan memastikan pemerataan pembangunan, perlindungan terhadap kelompok lemah, dan pengawasan negara atas cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Studi kasus tersebut mencerminkan makna Pancasila sebagai dasar falsafah negara dalam konteks

- A. menolak dominasi individualisme dengan menegaskan kolektivisme demi kesejahteraan bersama
- B. mendukung liberalisme ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional terhadap internasional
- C. menghendaki supremasi individu sebagai landasan dalam kehidupan bernegara
- D. hanya menekankan aspek politik tanpa mengaitkan nilai sosial dalam masyarakat

Pembukaan UUD NKRI 1945 menegaskan pokok pikiran kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam batang tubuh UUD NKRI 1945, hal ini tercermin pada Pasal 27 dan Pasal 28 yang menjamin kesamaan kedudukan serta hak berserikat dan berpendapat. Namun, dalam praktik politik, masih banyak pelanggaran hak asasi, diskriminasi, dan ketidakadilan sosial. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana Pancasila seharusnya dipahami untuk memperkuat HAM di Indonesia. Jika dianalisis dengan pokok-pokok pikiran filsafat Pancasila, langkah paling tepat dalam memperkuat HAM di Indonesia adalah

- A. menegakkan keadilan sosial dengan memastikan distribusi sumber daya secara adil di semua lapisan masyarakat
- B. menjamin kesetaraan warga negara tanpa diskriminasi berdasarkan agama, suku, atau gender
- C. menguatkan nilai martabat manusia melalui perlindungan hak-hak dasar sesuai sila kedua
- D. menetapkan musyawarah demokratis sebagai sarana menyalurkan aspirasi rakyat agar hak-haknya terpenuhi

Pada saat rapat desa, masyarakat duduk bersama membahas rencana pembangunan jembatan. Semua warga diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat sebelum keputusan diambil secara mufakat. Dari perspektif sosiologis, Pancasila dipahami sebagai dasar negara karena

- A. nilai-nilainya lahir dari tradisi musyawarah dan budaya kolektif masyarakat Indonesia
- B. hanya merupakan gagasan pribadi tokoh bangsa tanpa pengalaman sosial masyarakat
- C. sepenuhnya menyalin pemikiran filsuf dari luar negeri
- D. tidak berkaitan dengan tradisi yang hidup di masyarakat

Era Reformasi menghadirkan desentralisasi politik dengan otonomi daerah. Dalam perspektif Pancasila, kebijakan ini bermakna bahwa

- A. Pancasila tidak lagi relevan sebagai acuan dalam kehidupan politik daerah
- B. kekuasaan daerah dijalankan sepenuhnya tanpa keterkaitan dengan negara pusat
- C. sistem politik nasional tidak memerlukan prinsip musyawarah dan mufakat
- D. Pancasila menjadi landasan moral dan politik untuk mewujudkan keadilan sosial secara merata

Seorang pejabat publik terbukti melakukan korupsi miliaran rupiah dari dana pembangunan infrastruktur desa. Akibatnya, jalan dan jembatan yang seharusnya bermanfaat bagi rakyat tidak pernah dibangun. Masyarakat kecil menderita karena akses ekonomi terhambat, sementara pejabat tersebut memperkaya diri dan kelompoknya. Analisis sila-sila Pancasila terhadap fenomena ini adalah

- A. melanggar sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab karena hak rakyat kecil untuk hidup layak dirampas
- B. melanggar sila Keadilan Sosial karena menambah ketimpangan dan merugikan kepentingan masyarakat luas
- C. melanggar sila Persatuan Indonesia karena korupsi melemahkan kepercayaan rakyat terhadap negara
- D. melanggar sila Ketuhanan Yang Maha Esa karena tindakan tersebut tidak sesuai dengan nilai moral dan kejujuran

Dalam merancang kebijakan publik, seorang tokoh menilai bahwa teori atau gagasan yang dianggap benar hanyalah yang dapat dipraktikkan dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Pemikiran ini mencerminkan

- A. Aristotelianisme, karena menekankan realisasi potensi dan tujuan akhir
- B. Pragmatisme, karena kebenaran ditentukan oleh manfaat praktis
- C. Positivisme, karena kebenaran hanya ditentukan melalui fakta empiris
- D. Postmodernisme, karena menolak standar tunggal dalam menentukan kebenaran

Seorang mahasiswa sering mendiskusikan isu politik di kampus. Ia berpendapat bahwa ideologi adalah "ilmu tentang ide-ide" yang membentuk pola pikir manusia. Pendapat mahasiswa tersebut paling sesuai dengan pandangan

- A. Machiavelli
- B. Sastrapratedja
- C. Destutt de Tracy
- D. Mubyarto

Pancasila merupakan hasil kolaborasi berbagai arus politik di BPUPK yang kemudian diperbaiki dan disetujui oleh PPKI dengan pembentukan negara. Pernyataan ini bermakna bahwa Pancasila

- A. hanya hasil gagasan Sukarno
- B. disahkan pertama kali oleh Mohammad Yamin
- C. muncul tiba-tiba tanpa perdebatan politik
- D. adalah karya bersama, bukan ciptaan pribadi tokoh tertentu

Pembukaan UUD 1945 alinea keempat menyatakan bahwa "... maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Pernyataan ini menunjukkan bahwa secara yuridis Pancasila

- A. memiliki kedudukan konstitusional sebagai dasar negara
- B. hanya bersifat ideologi politik, tidak mengikat secara hukum
- C. tidak berkaitan dengan UUD 1945
- D. bersifat moral semata, tanpa kekuatan mengikat

Saat menghadapi tantangan era reformasi, implementasi Pancasila sering mengalami pasang surut karena banyak penyelenggara negara enggan membicarakannya. Analisis yang tepat mengenai hal ini yaitu Pancasila

- A. hanya digunakan sebagai simbol seremonial tanpa peran substantif dalam kebijakan
- B. cukup dijadikan sebagai mata pelajaran di sekolah tanpa penguatan pada praktik sosial
- C. harus diinternalisasi konsisten pada nilai dasar, instrumental, dan praksis dalam kehidupan
- D. dipahami hanya dalam lingkup konstitusional tanpa keterkaitan dengan masyarakat

Filsafat dipandang sebagai suatu sistem pemikiran karena

- A. pemikiran filsafat selalu logis, teratur, dan saling berhubungan
- B. filsafat menekankan tradisi yang diwariskan tanpa kritik
- C. filsafat mengandung berbagai pandangan berbeda yang tidak saling terkait
- D. filsafat berfokus pada eksperimen empiris saja

Seorang tokoh ekonomi bernama Adam Smith dikenal sebagai bapak ilmu ekonomi modern. Ia berpendapat bahwa pasar akan mengatur dirinya sendiri melalui mekanisme “tangan tak terlihat” (*invisible hand*). Pemikiran Adam Smith ini erat kaitannya dengan ideologi

- A. kapitalisme
- B. komunisme
- C. liberalisme
- D. sosialisme

Seorang ilmuwan menemukan teknologi *Artificial Intelligence (AI)* yang dapat membuat keputusan medis. Ilmu pengetahuan menekankan efektivitas teknologi, sedangkan sebagian kalangan agama mengkritik potensi dehumanisasi. Dalam hal ini, filsafat berfungsi

- A. menyampingkan agama demi efektivitas ilmu pengetahuan
- B. menentukan norma moral baru yang bisa menggantikan agama
- C. menjadi refleksi kritis agar ilmu dan agama dapat dipahami secara rasional dan seimbang
- D. menggunakan metode eksperimen untuk membuktikan kebenaran agama

Dalam biologi modern, penelitian tentang *rekayasa DNA* menimbulkan perdebatan metodologis: apakah hasil laboratorium sudah cukup untuk disebut kebenaran ilmiah. Fungsi filsafat sebagai sistem pengetahuan adalah

- A. menentukan cara eksperimen di laboratorium
- B. menolak semua hasil eksperimen yang tidak sesuai agama
- C. memberikan dasar kritis-rasional untuk menilai validitas dan makna pengetahuan ilmiah
- D. menggantikan seluruh metode ilmiah dengan dogma filsafat

Ketika pandemi COVID-19 melanda dunia, pemerintah Indonesia menggabungkan ilmu pengetahuan modern dengan nilai gotong royong untuk mengatasi krisis. Respons ini mencerminkan Pancasila sebagai ideologi terbuka karena Pancasila

- A. mampu menutup diri dari nilai-nilai global
- B. hanya bersumber dari budaya lokal tanpa penyesuaian
- C. dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan jati diri
- D. bergantung penuh pada budaya asing untuk bertahan

Di sebuah daerah, muncul gerakan masyarakat yang menolak ideologi Pancasila dan melakukan provokasi melalui media daring dengan menyebarkan ujaran kebencian terhadap kelompok berbeda agama. Tindakan tersebut memicu potensi konflik sosial antarwarga. Bagaimana Pancasila difungsikan sebagai paradigma pembangunan ketahanan nasional dalam menghadapi kasus tersebut?

- A. Pancasila menjadi pedoman dalam menjaga persatuan bangsa dengan meneguhkan nilai toleransi dan gotong royong, sehingga masyarakat tidak mudah terpecah oleh provokasi yang memicu konflik.
- B. Pancasila difungsikan hanya sebagai pedoman administratif dalam menjalankan pemerintahan, sehingga kasus provokasi kebencian dapat diselesaikan sebatas urusan birokrasi negara.
- C. Pancasila digunakan sebagai dasar pembenaran untuk membatasi kebebasan beragama kelompok tertentu, demi menciptakan stabilitas ketahanan nasional secara sepihak.
- D. Pancasila dijadikan landasan untuk mendukung berdirinya negara baru dengan sistem pemerintahan yang sesuai aspirasi sebagian kelompok masyarakat, agar tercapai keadilan menurut mereka.

Nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia, misalnya nilai keadilan diwujudkan Pancasila menempatkan manusia sebagai makhluk monopluralis, yaitu memiliki dimensi jasmani-rohani, individu-sosial, dan pribadi-Tuhan. Pandangan ini menunjukkan bahwa dasar keberadaan manusia dijadikan pijakan dalam Pancasila. Contoh tersebut merupakan landasan... Pancasila.

- A. ontologis
- B. epistemologis
- C. aksiologis
- D. yuridis

Di beberapa daerah, konflik muncul karena perebutan hak atas warisan budaya, misalnya klaim tari tradisional atau kuliner khas yang diperdebatkan antarwilayah. Persoalan ini menunjukkan bahwa tantangan implementasi Pancasila di bidang budaya adalah

- A. lemahnya kesadaran menjaga warisan budaya bersama sehingga menimbulkan persaingan dan mengikis persatuan
- B. mahal biaya promosi kebudayaan sehingga seni tradisional sulit dikenal hingga tingkat internasional
- C. kurangnya ruang kreatif bagi seniman lokal untuk mengekspresikan kebudayaan dalam bentuk modern
- D. minimnya dukungan pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas pementasan seni di tingkat lokal

Pemerintah daerah membangun rumah sakit modern dengan fasilitas lengkap untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat. Namun, dalam proses pembangunan terjadi protes dari sebagian masyarakat karena lahan yang digunakan merupakan bekas tanah wakaf masjid. Pemerintah kemudian melakukan musyawarah dengan tokoh agama dan masyarakat untuk mencari solusi, hingga akhirnya diputuskan pembangunan tetap dilakukan dengan mengganti tanah wakaf tersebut dengan lahan baru yang lebih layak untuk pembangunan masjid. Berdasarkan kasus tersebut, analisis yang tepat tentang implementasi nilai ketuhanan dalam paradigma pembangunan adalah

- A. pembangunan rumah sakit dapat dilakukan tanpa memperhatikan keberatan masyarakat, karena tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat
- B. protes masyarakat tidak perlu dihiraukan karena pembangunan fasilitas kesehatan merupakan kepentingan bersama yang lebih penting daripada kepentingan kelompok tertentu
- C. musyawarah antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat menunjukkan bahwa nilai ketuhanan diwujudkan melalui penghormatan terhadap fungsi tanah wakaf dan kebutuhan umat
- D. penggantian tanah wakaf dengan lahan lain merupakan bentuk kompromi politik semata, bukan implementasi nilai ketuhanan dalam pembangunan

Pembukaan UUD 1945 alinea keempat memuat rumusan dasar negara Indonesia yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Teks ini menjadi landasan hukum dan politik bangsa Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, Pembukaan UUD 1945 termasuk kategori Pancasila.

- A. objek formal
- B. objek material
- C. nilai instrumental
- D. nilai fundamental

Pemerintah menyelenggarakan Festival Budaya Nasional di Yogyakarta dengan melibatkan seniman dari Aceh, Kalimantan, Jawa, Bali, dan Papua. Kegiatan ini bertujuan memperkenalkan keragaman budaya Indonesia sekaligus memperkuat rasa persaudaraan antar daerah. Jika dianalisis berdasarkan implementasi sila ketiga Pancasila: Persatuan Indonesia, maka kegiatan tersebut mencerminkan

- A. penghargaan terhadap keragaman budaya yang memperkuat persatuan bangsa
- B. dominasi budaya Jawa sebagai tuan rumah sehingga mengurangi peran budaya lain
- C. upaya pemerintah pusat untuk menunjukkan kekuasaan politik terhadap daerah
- D. perayaan seremonial semata yang tidak berpengaruh pada persatuan bangsa

Pemerintah melaksanakan program pembangunan bendungan untuk mengatasi krisis air dan meningkatkan produksi pertanian. Namun, pembangunan ini menimbulkan dampak sosial berupa relokasi masyarakat desa sekitar bendungan. Sebagian warga menilai proses relokasi dilakukan terburu-buru dan kompensasi yang diberikan tidak sesuai kebutuhan hidup layak. Jika dianalisis dari perspektif implementasi nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab sila ke-2 Pancasila, maka kebijakan pembangunan tersebut seharusnya

- A. memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak terpenuhi dengan pemberian kompensasi yang adil
- B. mengutamakan kepentingan nasional meskipun sebagian hak masyarakat harus dikorbankan
- C. melaksanakan pembangunan sesuai target waktu tanpa terlalu lama menunggu persetujuan warga
- D. memberikan prioritas pada keberhasilan teknis proyek karena manfaat jangka panjang lebih penting

Mahasiswa perlu memahami sejarah perumusan Pancasila agar tidak hanya menghafal tanggal dan tokoh, tetapi juga mampu melihat dinamika, nilai, dan konteks kebangsaan yang melatarbelakanginya. Situasi tersebut menunjukkan bahwa ruang lingkup Pendidikan Pancasila pada aspek sejarah dapat dijelaskan sebagai

- A. hasil keputusan sidang tahun 1945 yang disepakati oleh para tokoh bangsa, tanpa menyoroti dinamika perdebatan yang terjadi
- B. cara untuk menguraikan proses lahirnya Pancasila dengan menampilkan tokoh, peristiwa, serta konteks sosial politik yang mempengaruhi perumusan dasar negara
- C. gambaran Pancasila terutama sebagai simbol persatuan historis bangsa, namun kurang menekankan relevansinya bagi kehidupan kebangsaan masa kini
- D. gambaran sejarah Pancasila terutama dari sisi dokumen formal kenegaraan, dengan perhatian terbatas pada aspek etika maupun refleksi kritis generasi sekarang

Sila pertama Pancasila memiliki kedudukan yang fundamental karena menegaskan pentingnya nilai religius sebagai landasan moral bangsa Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, pengertian sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang tepat adalah

- A. setiap warga negara wajib memeluk agama tertentu dan tidak boleh ada kebebasan dalam berkeyakinan
- B. prinsip yang menyatakan bahwa negara yang rakyatnya bertuhan, mengharapkan berdirinya Indonesia merdeka berdasarkan landasan kerohanian, menjadi fundamen moral dan berdimensi religius bagi seluruh kehidupan negara
- C. agama dijadikan hukum tertinggi negara sehingga seluruh aturan negara harus sama dengan aturan agama mayoritas
- D. negara hanya mengakui satu agama resmi dan tidak memberi ruang bagi agama serta kepercayaan lain yang dianut rakyatnya

Pemerintah desa menyalurkan bantuan sosial (bansos) bagi warga kurang mampu. Namun, beberapa keluarga mampu tetap menerima bantuan karena memiliki kedekatan dengan panitia penyalur. Apa akibat dari praktik penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran terhadap penerapan prinsip sila ke-5 Pancasila?

- A. Semua warga merasakan manfaat secara merata dan bangga dengan pemerintah desa.
- B. Ketidakadilan bagi warga yang membutuhkan sehingga prinsip keadilan sosial terganggu.
- C. Program tetap berhasil karena sebagian warga terbantu.
- D. Penyaluran bansos menjadi lebih cepat dan efisien karena asal semua tersalurkan.

Perkembangan teknologi dan informasi yang begitu cepat membuat masyarakat mudah terpapar berita hoaks, ujaran kebencian, dan provokasi di media sosial. Kondisi ini kerap menimbulkan perselisihan, bahkan konflik berbasis suku, agama, ras, dan golongan (SARA). Fakta tersebut memperlihatkan bahwa Pancasila masih sering dipandang hanya sebagai simbol, bukan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan kasus tersebut, Pendidikan Pancasila memiliki urgensi bagi masyarakat Indonesia saat ini, yaitu untuk

- A. mengajarkan keterampilan berpikir kritis untuk menghadapi tantangan globalisasi dan kompetisi internasional
- B. menambah wawasan akademis mahasiswa tanpa dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari
- C. landasan moral dan etika untuk memilah informasi yang beredar agar terhindar dari perpecahan
- D. dijadikan simbol formal kenegaraan tanpa penerapan nyata dalam kehidupan sehari-hari

Di sebuah desa di Malang, warga yang terdiri dari suku Jawa, Madura, dan Arab merencanakan pembangunan balai desa. Awalnya terjadi perbedaan pendapat terkait desain bangunan yang sesuai dengan budaya masing-masing. Namun setelah diadakan musyawarah dengan menjunjung nilai Pancasila, akhirnya disepakati desain yang memadukan unsur budaya ketiga kelompok. Proses ini membuat warga semakin kompak dan rukun. Berdasarkan kasus tersebut, tujuan Pendidikan Pancasila yang paling tepat adalah

- A. dijadikan sebagai dokumen sejarah yang hanya dipelajari untuk mengenang perjuangan bangsa Indonesia pada masa lalu
- B. hanya berfungsi sebagai aturan normatif yang dipelajari dalam ranah akademik tanpa keterkaitan dengan kehidupan sehari-hari
- C. digunakan sebagai alat politik oleh pemerintah untuk memperkuat kekuasaan semata tanpa memperhatikan masyarakat
- D. memainkan peran penting dalam mewujudkan persatuan, keadilan, dan keberagaman dalam masyarakat Indonesia

Pemerintah daerah menyelenggarakan musyawarah pembangunan desa yang melibatkan perangkat desa, tokoh masyarakat, pemuda, dan perwakilan perempuan. Dalam musyawarah tersebut dibahas prioritas penggunaan dana desa, seperti perbaikan jalan, pembangunan posyandu, atau penyediaan beasiswa. Namun, muncul perdebatan karena sebagian pihak lebih mementingkan pembangunan fisik dibanding kebutuhan sosial. Pada akhirnya keputusan diambil melalui musyawarah dengan mempertimbangkan suara mayoritas tetapi tetap menghargai pendapat kelompok minoritas. Berdasarkan kasus tersebut, bagaimana implementasi sila ke-4 Pancasila dalam proses musyawarah tersebut dapat dianalisis?

- A. Proses musyawarah mencerminkan semangat demokrasi yang menekankan kebebasan individu tanpa memperhatikan kepentingan bersama.
- B. Musyawarah tersebut menunjukkan pelaksanaan prinsip kerakyatan yang mengutamakan keputusan bersama dengan menghargai perbedaan pendapat.
- C. Musyawarah dianggap kurang sesuai dengan sila ke-4 karena keputusan seharusnya hanya diambil oleh pemimpin, bukan masyarakat luas.
- D. Proses tersebut hanya menekankan pada suara mayoritas sehingga tidak mencerminkan makna kerakyatan yang sebenarnya.

Dalam sidang BPUPK tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyatakan bahwa dasar bagi Indonesia merdeka adalah dasar dari suatu negara yang akan didirikan, yang disebut philosophische grondslag. Apa arti dari philosophische grondslag menurut Soekarno?

- A. Falsafah dasar atau fundamen filsafat yang menjadi dasar berdirinya negara.
- B. Sistem pemerintahan yang demokratis dan dilaksanakan melalui pemilu.
- C. Susunan lembaga negara yang terdiri dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
- D. Kesatuan budaya, bahasa, dan agama yang menyatukan bangsa.

Pada masa Orde Baru, Pancasila diajarkan dengan pola indoktrinasi, bahkan diwajibkan melalui program seperti P4. Namun, pasca reformasi, pola tersebut hilang karena dianggap membatasi kebebasan berpikir. Akibatnya, sebagian generasi yang lahir setelah tahun 2000 sering dituding kurang memiliki pemahaman mendalam mengenai akar sejarah Pancasila. Fenomena ini memperlihatkan adanya perbedaan konteks pemahaman Pancasila pada masa lalu dan masa kini. Berdasarkan uraian di atas, pernyataan yang paling tepat untuk menggambarkan perbedaan pemahaman Pancasila dulu dan kini adalah

- A. pemahaman Pancasila dulu diarahkan untuk menjawab persoalan dan tantangan zaman terhadap jati diri, identitas nasional, dan cita-cita bernegara dan berbangsa, terutama dalam mendirikan negara Indonesia yang merdeka
- B. Pancasila dulu dan kini tidak mengalami perubahan makna, karena sejak awal kemerdekaan Pancasila tetap menjadi dasar negara yang tidak dapat diubah oleh siapapun
- C. generasi setelah reformasi memahami Pancasila dengan cara lebih bebas, sehingga nilai-nilainya tidak lagi diarahkan untuk menjawab persoalan kebangsaan melainkan hanya sekadar simbol negara
- D. pemahaman Pancasila kini sepenuhnya ditentukan oleh tafsir masing-masing kelompok masyarakat sehingga tidak lagi memiliki arah pembahasan yang terpusat

Melalui kurikulum PPKn, peserta didik diperkenalkan dengan perjalanan sejarah Pancasila dari masa perumusan hingga penerapannya dalam berbagai periode, mulai dari Revolusi Fisik, masa RIS, Demokrasi Parlementer, Orde Baru, hingga Reformasi. Mengapa penting mengajarkan perjalanan sejarah Pancasila dari masa perumusan hingga Reformasi dalam kurikulum PPKn?

- A. Agar peserta didik memahami Pancasila hanya sebagai teori abstrak.
- B. Agar peserta didik menghafalkan sila-sila tanpa melihat konteks sejarah.
- C. Agar peserta didik dapat memahami Pancasila secara utuh, kontekstual, dan historis.
- D. Agar peserta didik dapat memahami jauhnya kajian Pancasila dengan sejarah Indonesia.

Dalam kuliah hukum tata negara, dosen menjelaskan: "Dasar negara adalah norma dasar yang menjadi cita-cita hukum tertinggi dan berfungsi mengarahkan seluruh peraturan hukum." Pandangan tersebut sesuai dengan pemikiran

- A. Kaelan karena menekankan aspek filsafat moral dan kondisi ideal hukum
- B. Notonagoro karena menekankan Pancasila sebagai *grand norm*
- C. Hamid Attamimi karena menekankan standar hukum
- D. Jimly Asshidiqie karena menekankan cita-cita hukum

Ciri filsafat sebagai ilmu berbeda dari ilmu lainnya. Ciri filsafat yang paling mencerminkan keunikannya adalah

- A. parsial dan teknis, fokus pada bidang tertentu secara terbatas
- B. menyeluruh, mendasar, kritis, dan sistematis dalam memandang realitas
- C. empiris murni, hanya mengandalkan observasi dan eksperimen
- D. dogmatis, memegang kebenaran yang tidak boleh dipertanyakan lagi

Dokumen sejarah memiliki peran penting untuk menganalisis peran dan kedudukan Pancasila pada tiap-tiap masa. Contoh dokumen yang muncul adalah:

1. UUD Sementara 1950,
2. Risalah Sidang Konstituante 1956–1959, dan
3. Dokumen jatuh bangunnya kabinet parlementer.

Contoh-contoh tersebut, merupakan dokumen yang dapat digunakan untuk menganalisis kedudukan dan peran Pancasila pada masa

- A. Revolusi Fisik (1945–1950)
- B. Republik Indonesia Serikat (1949–1950)
- C. Republik Parlementer (1950–1959)
- D. Orde Baru (1966–1998)

Kedudukan Pancasila pada masa Revolusi Fisik berbeda dengan masa-masa setelahnya karena Pancasila

- A. dijadikan asas tunggal dalam organisasi sosial politik
- B. berfungsi sebagai dasar ideologis perjuangan mempertahankan kemerdekaan
- C. dijadikan dasar pembentukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
- D. dijadikan pedoman pengamalan dalam bentuk P4

Makna dan peran Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara adalah sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada rakyat, menjaga HAM, dan menjamin persatuan. Dalam kasus relokasi komunitas pesisir terdampak abrasi, kebijakan yang paling sesuai dengan peran tersebut adalah

- A. segera mempercepat relokasi demi mengutamakan tujuan pertumbuhan ekonomi nasional
- B. relokasi berbasis kajian ilmiah, musyawarah dengan warga, kompensasi adil, jaminan HAM, dan payung hukum yang jelas
- C. menunda relokasi agar "persatuan" tidak terganggu, sekalipun risiko keselamatan meningkat
- D. menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada tokoh agama setempat demi ketenteraman sosial

Sidang pertama BPUPK tahun 1945 menghasilkan gagasan-gagasan dasar negara dari beberapa tokoh. Urutan penyampaian gagasan yang benar adalah

- A. Soepomo – Yamin – Soekarno
- B. Yamin – Soepomo – Soekarno
- C. Soekarno – Yamin – Soepomo
- D. Yamin – Soekarno – Soepomo

Pemerintah menyusun peraturan tentang lingkungan hidup yang melarang penebangan hutan secara liar, mewajibkan reboisasi, serta memberikan sanksi bagi perusahaan yang merusak alam. Peraturan ini ditujukan untuk menjaga kelestarian alam demi generasi sekarang dan masa depan. Berdasarkan kasus tersebut, bagaimana penerapan Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum tercermin dalam peraturan tersebut?

- A. Peraturan hanya menguntungkan perusahaan besar agar dapat terus mengeksploitasi sumber daya alam.
- B. Peraturan dibuat untuk menjaga kelestarian lingkungan sebagai wujud tanggung jawab terhadap Tuhan, manusia, dan generasi mendatang sesuai nilai Pancasila.
- C. Peraturan lebih menekankan pada keuntungan ekonomi tanpa mempertimbangkan kelestarian lingkungan.
- D. Peraturan dibuat hanya untuk kepentingan politik sesaat pemerintah yang berkuasa.

Pemerintah menetapkan kebijakan subsidi BBM agar harga tetap terjangkau bagi masyarakat, karena BBM merupakan kebutuhan pokok yang memengaruhi kehidupan banyak orang. Namun, pemerintah juga memberi peluang kepada perusahaan swasta untuk mengelola energi alternatif ramah lingkungan, dengan tetap diawasi agar tidak merugikan masyarakat. Dari kasus tersebut, ciri sistem ekonomi Pancasila yang tercermin adalah

- A. perekonomian sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar bebas tanpa adanya campur tangan negara
- B. seluruh sektor ekonomi diatur dan dikendalikan sepenuhnya oleh negara tanpa melibatkan pihak swasta
- C. cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara, swasta diberi ruang dengan pengawasan
- D. pihak swasta memegang peran dominan dalam pengelolaan sumber daya ekonomi dan kegiatan produksi

Sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 membahas berbagai usulan dasar negara dari para tokoh nasional. Peristiwa ini merupakan momen penting yang melahirkan istilah dan gagasan dasar Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Makna dari peristiwa kunci perumusan Pancasila ini adalah...

- A. proses penyusunan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia Merdeka yang berasal dari nilai-nilai pandangan hidup masyarakat Indonesia
- B. pengesahan Pancasila oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sebagai bagian dari Undang-Undang Dasar 1945
- C. pembentukan BPUPKI yang berfungsi untuk menyelidiki dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, termasuk perumusan dasar negara
- D. pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 yang memperkenalkan lima prinsip dasar negara dengan istilah Pancasila

Peran historis Pancasila pada masa Revolusi Fisik terutama tercermin saat Pancasila

....

- A. dijadikan asas tunggal organisasi politik pada masa pergerakan nasional
- B. berfungsi sebagai pemersatu bangsa dalam menghadapi agresi militer Belanda
- C. dijadikan dasar lahirnya sistem multipartai di Indonesia
- D. ditetapkan melalui TAP MPR No. II/MPR/1978 sebagai pedoman hidup bangsa

Perhatikan peristiwa berikut:

1. Perhimpunan Indonesia tahun 1924, menekankan persatuan, solidaritas, nonkooperasi, dan kemandirian dalam melawan penjajah.
2. Pada sidang BPUPK pada 1 Juni 1945, Sukarno menyampaikan pidato mengenai dasar falsafah negara Indonesia Merdeka
3. Pada 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara dengan rumusan final.

Berdasarkan uraian di atas, aspek mendasar dalam sejarah Pancasila yang ditunjukkan oleh ketiga peristiwa tersebut adalah

- A. Pancasila lahir secara bertahap melalui proses pembuahan ide, perumusan gagasan, hingga pengesahan sebagai dasar negara
- B. Pancasila sejak awal sudah menjadi ideologi baku tanpa perlu melalui proses panjang perumusan
- C. peristiwa-peristiwa tersebut hanya menegaskan bahwa Pancasila merupakan produk kompromi politik tanpa dasar pemikiran yang kuat
- D. Pancasila dirumuskan secara spontan oleh para tokoh bangsa pada saat proklamasi, tanpa didahului gagasan sebelumnya

Dalam menghadapi era globalisasi, bangsa Indonesia sering menghadapi tantangan masuknya budaya asing yang dapat memengaruhi jati diri bangsa. Berdasarkan fungsi Pancasila sebagai dasar falsafah negara, Pancasila seharusnya memiliki peran untuk

- A. hanya dijadikan dasar hukum untuk mengatur cabang eksekutif dan legislatif
- B. menjadi identitas nasional dan jati diri bangsa yang membedakan dari ideologi lain
- C. dijadikan pedoman teknis dalam menyusun kebijakan ekonomi negara
- D. hanya difungsikan sebagai landasan moral dalam bidang pertahanan nasional

Sebuah tim peneliti lingkungan melakukan proyek reklamasi pantai untuk pembangunan kawasan wisata. Proyek ini dapat merusak ekosistem lokal dan mengancam keberlanjutan sumber daya laut yang menjadi tumpuan hidup masyarakat pesisir. Dalam konteks ini, penerapan Pancasila sebagai paradigma keilmuan berarti

- A. peneliti harus menyeimbangkan pengembangan ilmu dengan nilai-nilai Pancasila, menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat
- B. peneliti boleh fokus pada pembangunan ekonomi, meski merusak ekosistem, karena kemajuan ilmu harus diutamakan
- C. Pancasila hanya relevan dalam teori pendidikan, tidak perlu diterapkan dalam penelitian lingkungan
- D. peneliti dapat mengabaikan nilai sosial dan budaya lokal demi hasil penelitian yang lebih cepat dan efisien

Di sebuah daerah tambang, perusahaan membuang limbah ke sungai hingga merusak ekosistem dan mengancam kesehatan ribuan warga. Pemerintah setempat membiarkan praktik itu karena alasan pertumbuhan ekonomi. Masyarakat miskin paling terdampak karena kehilangan sumber air bersih dan pekerjaan. Dari perspektif filsafat Pancasila, implementasi sila-sila dalam kasus ini paling tepat dianalisis sebagai

- A. nilai, karena kerusakan lingkungan mencederai prinsip keadilan sosial dalam sila kelima
- B. realitas, karena praktik pembangunan ekonomi belum sejalan dengan cita-cita Pancasila
- C. substansi, karena negara seharusnya menjadikan Pancasila sebagai dasar kebijakan pembangunan
- D. nilai dan realitas sekaligus, karena keduanya tampak dalam kasus tersebut

Indonesia menempatkan toleransi beragama pada kedudukan tinggi. Hal ini menggambarkan Pancasila sebagai dasar falsafah negara karena Pancasila

- A. menjunjung tinggi toleransi agama dengan menolak sikap anti agama dan sekularisme
- B. mewajibkan semua warga untuk mengikuti agama tertentu demi kesatuan nasional
- C. menolak keberagaman agama dan hanya mengakui agama mayoritas masyarakat
- D. memisahkan sepenuhnya kehidupan beragama dari penyusunan kebijakan negara

Proklamasi 17 Agustus 1945 bukan hanya pernyataan politik, tetapi juga lahir dari dasar filsafat bangsa yang tercermin dalam Pancasila. Proses pengesahan Pancasila sehari setelah Proklamasi menunjukkan bahwa dasar negara Indonesia tidak lahir secara kebetulan, tetapi melalui perenungan panjang dan kompromi historis. Saat ini, banyak kalangan muda menganggap Pancasila hanya teks formal yang dihafalkan tanpa makna, sehingga relevansinya dipertanyakan.

Berdasarkan sejarah filsafat Pancasila, analisis paling tepat untuk menjawab keraguan generasi muda adalah Pancasila

- A. relevan karena merupakan hasil permenungan mendalam para pendiri bangsa yang dituangkan dalam kompromi historis sidang BPUPK
- B. tetap kuat karena secara formal disahkan dalam Pembukaan UUD NKRI 1945 sehingga memiliki kekuatan hukum tertinggi
- C. relevan karena nilai-nilainya sudah hidup dalam budaya bangsa jauh sebelum Proklamasi
- D. bersifat praktis karena sejak awal dipahami sebagai pedoman hidup sehari-hari, bukan hanya gagasan filosofis

Dalam rapat desa, masyarakat duduk bersama membahas rencana pembangunan jembatan. Semua warga diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat sebelum keputusan diambil secara mufakat. Dari perspektif sosiologis, Pancasila dipahami sebagai dasar negara karena

- A. nilai-nilainya lahir dari tradisi musyawarah dan budaya kolektif masyarakat Indonesia
- B. hanya merupakan gagasan pribadi tokoh bangsa tanpa pengalaman sosial masyarakat
- C. sepenuhnya menyalin pemikiran filsuf dari luar negeri
- D. tidak berkaitan dengan tradisi yang hidup di masyarakat

Pemilu 1955 menjadi tonggak penting dalam sejarah politik Indonesia karena melibatkan partisipasi rakyat secara luas. Dalam konteks Pancasila sebagai dasar negara, peristiwa ini menunjukkan bahwa

- A. demokrasi Pancasila hanya dapat dijalankan dengan mengutamakan kekuasaan elit politik
- B. Pancasila dijalankan semata-mata sebagai doktrin hukum tanpa aspek politik praktis
- C. kehidupan politik nasional diarahkan sepenuhnya pada model demokrasi negara lain
- D. demokrasi Pancasila menempatkan rakyat sebagai subjek utama dalam proses politik bangsa

Sebuah perusahaan tambang membuang limbah ke sungai tanpa pengolahan, menyebabkan ribuan warga kehilangan sumber air bersih. Anak-anak mengalami penyakit kulit, dan nelayan kehilangan mata pencaharian karena ikan mati. Perusahaan beralasan bahwa aktivitas tersebut mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Analisis sila-sila Pancasila terhadap fenomena ini adalah melanggar sila

- A. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab karena merusak ruang hidup dan kesehatan manusia
- B. Keadilan Sosial karena kerugian hanya ditanggung rakyat kecil, sedangkan perusahaan menikmati keuntungan
- C. Persatuan Indonesia karena kerusakan lingkungan mengancam keberlanjutan bangsa
- D. Ketuhanan Yang Maha Esa karena manusia tidak menjaga ciptaan Tuhan

Seorang pemimpin menegaskan bahwa tindakan manusia bernilai moral apabila dilakukan semata-mata karena kewajiban, tanpa mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan. Pandangan ini dekat dengan

- A. pragmatisme, karena manfaat praktis lebih diutamakan daripada kewajiban
- B. postmodernisme, karena menolak standar moral universal
- C. kantianisme, karena menekankan kewajiban moral melalui imperatif kategoris
- D. aristotelianisme, karena mengajarkan tujuan akhir sebagai dasar kebenaran

Dalam sebuah rapat pembangunan daerah, seorang ekonom menegaskan bahwa ideologi harus mendukung kesejahteraan rakyat melalui sistem ekonomi kerakyatan. Pandangan ini sesuai dengan tokoh

- A. Mubyarto
- B. Soerjanto
- C. Tjokroamidjojo
- D. Kaderi

Dalam pidatonya 1 Juni 1945, Sukarno menyebut Pancasila sebagai *philosophische grondslag* atau *staatsidee*. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila

- A. hanya menjadi doktrin politik praktis
- B. pertama kali disahkan dalam bentuk UUD 1945
- C. merupakan gagasan pribadi Sukarno
- D. dipahami sebagai dasar filsafat dan ideologi negara

TAP MPR No. V/MPR/1973 dan TAP MPR No. IX/MPR/1978 mengukuhkan kembali kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman hidup bangsa. Dari aspek yuridis, ketetapan ini menegaskan bahwa Pancasila

- A. mengikat seluruh lembaga negara dan masyarakat
- B. hanya berlaku sebagai pedoman moral tanpa konsekuensi hukum
- C. bersifat sementara, hanya selama berlakunya Tap MPR
- D. dapat diganti jika ada ketetapan baru.

Pernah terjadi masa ketika Pancasila dihapus dari kurikulum pendidikan nasional, sehingga pemahaman generasi muda terhadap Pancasila melemah. Berdasarkan dinamika tersebut, apa upaya yang paling tepat untuk memperkuat implementasi Pancasila?

- A. Menjadikan Pancasila sebatas dasar hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan.
- B. Mengajarkan Pancasila hanya pada jenjang sekolah dasar sebagai bagian pendidikan moral.
- C. Mengintegrasikan Pancasila dalam pendidikan tinggi sebagai sumber inspirasi dan pedoman bangsa.
- D. Memahami Pancasila hanya melalui ceramah tokoh bangsa tanpa proses aktualisasi nilai.

Filsafat sebagai sistem berbeda dari pandangan non-filosofis, karena

- A. menawarkan kerangka berpikir logis, mendalam, dan menyeluruh
- B. mengandalkan kepercayaan tradisional yang tidak boleh dipertanyakan
- C. memusatkan perhatian pada objek-objek empiris
- D. mengandalkan pendapat pribadi yang tidak teruji rasional

Di sebuah negara, sistem ekonomi memberi kebebasan penuh bagi individu untuk memiliki modal, membuka usaha, dan bersaing di pasar. Pemerintah hanya berperan sebagai pengatur agar persaingan berjalan sehat. Sistem yang diterapkan negara tersebut mencerminkan ideologi

- A. Komunisme
- B. Kapitalisme
- C. Liberalisme
- D. Sosialisme

Dalam dunia kedokteran, praktik *euthanasia* (mengakhiri hidup pasien atas permintaan) masih menjadi perdebatan. Ilmu kedokteran melihatnya dari sisi medis, agama menolaknya karena bertentangan dengan prinsip kehidupan. Bagaimana filsafat memposisikan kasus tersebut?

- A. Menjadi dasar rasional untuk menimbang secara etis hubungan keduanya.
- B. Mengikuti sepenuhnya larangan agama tanpa pertimbangan lain.
- C. Menentukan keputusan medis berdasarkan manfaat praktis saja.
- D. Menganggap persoalan ini bukan wilayah filsafat, melainkan hanya ilmu dan agama.

Dalam penelitian sosial, metode kuantitatif sering dianggap lebih “ilmiah” daripada kualitatif. Namun, filsafat ilmu menekankan bahwa keduanya sah selama memenuhi kaidah metodologis. Fungsi filsafat di sini adalah

- A. menentukan statistik mana yang paling tepat dipakai peneliti
- B. menjamin bahwa hanya metode kuantitatif yang ilmiah
- C. memberikan dasar epistemologis agar semua metode ilmiah dinilai secara kritis dan rasional
- D. menolak semua bentuk penelitian sosial karena kurang objektif

Dalam persaingan ekonomi global, Indonesia membuka investasi asing tetapi tetap melindungi UMKM dan menata pasar agar adil. Respons ini menunjukkan Pancasila sebagai ideologi terbuka karena

- A. menutup diri dari perdagangan bebas dan investasi asing
- B. mengandalkan negara lain untuk menjaga perekonomian nasional
- C. mengadaptasi dinamika global sambil melindungi kepentingan rakyat
- D. menyamakan seluruh kebijakan dengan negara-negara maju

Sejumlah mahasiswa di sebuah universitas negeri terdeteksi terlibat kelompok diskusi tertutup yang menyebarkan paham radikal melalui media sosial. Mereka menolak demokrasi dan mendorong berdirinya negara baru berbasis agama tertentu. Bagaimana Pancasila difungsikan sebagai paradigma pembangunan ketahanan nasional dalam menghadapi kasus tersebut?

- A. Pancasila dijadikan dasar dalam memperkuat ketahanan nasional melalui peneguhan komitmen kebangsaan, sehingga masyarakat mampu menolak ideologi radikal yang bertentangan dengan nilai persatuan bangsa.
- B. Pancasila difungsikan sebagai pedoman teknis penyusunan kebijakan ekonomi nasional, sehingga ancaman radikalisme dapat diatasi melalui pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- C. Pancasila digunakan sebagai landasan untuk memperluas keterbukaan politik tanpa batas, sehingga setiap kelompok bebas menyebarkan ideologinya termasuk yang menolak demokrasi, demi menjaga keberagaman.
- D. Pancasila berfungsi sebagai dasar penguatan identitas hukum nasional, sehingga seluruh aturan perundang-undangan diarahkan untuk mendukung berdirinya sistem pemerintahan sesuai tuntutan kelompok tertentu.

Nilai-nilai Pancasila diwujudkan dalam kehidupan nyata, misalnya sila Persatuan Indonesia tercermin pada kegiatan gotong royong warga membangun jembatan desa, dan sila Kerakyatan terlihat dalam musyawarah warga untuk mengambil keputusan bersama. Contoh tersebut termasuk landasan Pancasila.

- A. ontologis
- B. epistemologis
- C. aksiologis
- D. sosiologis

Tingginya kasus perundungan (*bullying*) di sekolah yang viral di media sosial menunjukkan lemahnya pengamalan nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari.

Tantangan implementasi Pancasila di bidang sosial dari kasus tersebut adalah

- A. rendahnya kepedulian terhadap sesama yang melemahkan nilai kemanusiaan dan solidaritas sosial
- B. kurangnya sarana prasarana pendidikan yang membuat siswa sulit mengembangkan potensi diri
- C. tidak meratanya akses teknologi digital yang memengaruhi kesempatan belajar generasi muda
- D. menurunnya minat baca generasi muda yang berimbas pada lemahnya pemahaman budaya literasi

Pemerintah kota merencanakan pembangunan taman kota besar sebagai ruang publik. Namun, di lokasi pembangunan terdapat rumah ibadah yang sudah lama digunakan masyarakat. Untuk itu, pemerintah berdiskusi dengan pemuka agama dan warga, lalu membangun taman di lokasi lain sekaligus memperbaiki akses jalan menuju rumah ibadah agar tetap nyaman digunakan. Analisis yang tepat mengenai implementasi nilai ketuhanan dalam paradigma pembangunan adalah

- A. pemerintah menempatkan kepentingan ruang publik di atas kepentingan keagamaan masyarakat
- B. pemindahan lokasi pembangunan taman sekaligus perbaikan akses ke rumah ibadah mencerminkan penghargaan terhadap nilai ketuhanan
- C. rumah ibadah tidak perlu dipertimbangkan karena pembangunan taman lebih bermanfaat bagi masyarakat luas
- D. perbaikan akses jalan hanyalah strategi politik pemerintah, bukan wujud nilai ketuhanan

Risalah Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 memuat pengesahan UUD 1945 dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dokumen tersebut termasuk dalam kategori

.... Pancasila

- A. objek formal
- B. objek material
- C. nilai instrumental
- D. nilai fundamental

Pemerintah membangun jalan nasional yang menghubungkan wilayah terpencil dengan kota besar. Pembangunan ini dilakukan dengan melibatkan semua pemerintah daerah terkait dan memperhatikan kebutuhan masyarakat lokal. Jika dianalisis berdasarkan implementasi sila ketiga Pancasila: Persatuan Indonesia, maka dampak positif dari kebijakan tersebut adalah

- A. terwujudnya rasa kebersamaan antarwilayah karena akses semakin terbuka
- B. meningkatnya sikap individualisme masyarakat karena mobilitas tinggi
- C. terjadinya kesenjangan ekonomi antarwilayah karena jalan hanya menguntungkan kota besar
- D. hilangnya rasa persaudaraan karena daerah terpencil ditinggalkan

Pemerintah melaksanakan program pembangunan bendungan untuk mengatasi krisis air dan meningkatkan produksi pertanian. Namun, pembangunan ini menimbulkan dampak sosial berupa relokasi masyarakat desa sekitar bendungan. Sebagian warga menilai proses relokasi dilakukan terburu-buru dan kompensasi yang diberikan tidak sesuai kebutuhan hidup layak. Jika dianalisis dari perspektif implementasi sila kedua Pancasila: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, maka kebijakan pembangunan tersebut seharusnya

- A. memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak terpenuhi dengan pemberian kompensasi yang adil
- B. mengutamakan kepentingan nasional meskipun sebagian hak masyarakat harus dikorbankan
- C. melaksanakan pembangunan sesuai target waktu tanpa terlalu lama menunggu persetujuan warga
- D. memberikan prioritas pada keberhasilan teknis proyek karena manfaat jangka panjang lebih penting

Mahasiswa sering menghadapi persoalan etika akademik, seperti plagiarisme, intoleransi, dan kurangnya tanggung jawab sosial. Situasi ini menunjukkan perlunya pemahaman Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai pedoman etis dalam kehidupan nyata. Kasus tersebut menggambarkan bahwa ruang lingkup Pendidikan Pancasila mencakup hal-hal berikut, yaitu

- A. fokus pada aspek historis lahirnya Pancasila tahun 1945 dan peran tokoh perumusan, tanpa mengaitkannya dengan penerapan nilai moral di kehidupan sehari-hari
- B. menekankan posisi Pancasila sebagai ideologi formal negara yang mengikat secara normatif, sehingga lebih berfungsi pada ranah politik dan administratif ketimbang pedoman etis mahasiswa
- C. memberikan pemahaman filsafat yang mendasari Pancasila sebagai dasar negara, dengan tekanan pada kajian logis, namun belum menekankan nilai moral dalam praktik sosial maupun akademik
- D. menggunakan pendekatan etika dan moral sebagai objek formal, karena sila-sila Pancasila memuat nilai etis yang menjadi landasan kehidupan pribadi, sosial, kerja, tanggung jawab akademik, serta kebangsaan

Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Republik Indonesia dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan uraian tersebut, pengertian Pancasila yang tepat adalah

- A. dasar filsafat negara dan ideologi negara Republik Indonesia
- B. semboyan bangsa Indonesia yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika
- C. kitab hukum yang mengatur seluruh peraturan perundang-undangan
- D. peninggalan budaya dari kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara

Pemerintah membangun jalan tol baru untuk memperlancar distribusi barang. Namun, tarif tol dinilai terlalu mahal sehingga hanya kelompok ekonomi menengah ke atas yang dapat menikmatinya. Analisis implementasi nilai keadilan dari kasus tersebut adalah

- A. nilai keadilan sudah terwujud karena jalan tol bisa digunakan oleh masyarakat umum
- B. nilai keadilan belum terwujud karena akses pembangunan lebih banyak dinikmati kelompok tertentu
- C. pembangunan jalan tol tidak ada kaitannya dengan nilai keadilan, melainkan hanya aspek ekonomi
- D. nilai keadilan tercapai karena pemerintah tetap menyediakan jalan alternatif bagi masyarakat

Dalam kehidupan kampus yang semakin terhubung dengan dunia global, mahasiswa sering berinteraksi tidak hanya dengan sesama mahasiswa dari berbagai suku, agama, dan budaya di Indonesia, tetapi juga dengan mahasiswa asing. Situasi ini menuntut adanya sikap saling menghormati, kemampuan beradaptasi, dan penghargaan terhadap nilai-nilai universal. Berdasarkan kasus tersebut, apa urgensi Pendidikan Pancasila bagi mahasiswa?

- A. Hanya untuk memperdalam sejarah perumusan dasar negara, tanpa relevansi dengan tantangan masyarakat majemuk maupun global saat ini.
- B. Agar mahasiswa memiliki wawasan formal tentang ideologi negara, meskipun penerapannya terbatas pada konteks nasional saja.
- C. Berfungsi menanamkan nilai moral tradisional semata, tanpa menghubungkannya dengan dinamika kehidupan global yang terus berubah.
- D. Mempersiapkan mahasiswa menjadi bagian dari masyarakat Indonesia yang majemuk sekaligus global, dengan sikap saling menghormati, kemampuan beradaptasi, dan menjunjung tinggi nilai-nilai universal.

Pemerintah merancang kebijakan subsidi pupuk bagi petani kecil agar mereka tetap bisa memproduksi meski harga pasar pupuk tinggi. Kebijakan ini dibuat dengan pertimbangan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat, yang merujuk pada nilai-nilai dasar Pancasila. Berdasarkan kasus tersebut, tujuan Pendidikan Pancasila yang paling tepat adalah

- A. Pancasila hanya menjadi identitas bangsa tanpa berkaitan dengan kebijakan ekonomi.
- B. Pancasila digunakan hanya untuk kepentingan politik elit tanpa memikirkan kesejahteraan rakyat.
- C. Pancasila dijadikan sebagai landasan negara dan dasar hukum untuk mengatur kehidupan sosial, politik, dan ekonomi Indonesia.
- D. Pancasila hanya sebatas nilai moral, bukan pedoman dalam kebijakan ekonomi.

Dalam rapat OSIS di sebuah SMP, pengurus membahas program kerja tahunan. Ketua OSIS mengusulkan lomba kreativitas seni, sementara bendahara mengusulkan kegiatan bakti sosial. Perdebatan terjadi karena keduanya merasa programnya lebih penting. Akhirnya, guru pembina menyarankan agar pengurus OSIS melakukan musyawarah untuk menemukan solusi yang mengakomodasi kepentingan bersama. Apabila sila ke-4 Pancasila diterapkan dengan baik, maka keputusan yang diambil seharusnya

- A. mengakomodasi kedua program dengan mengatur prioritas agar keduanya tetap bisa dilaksanakan
- B. memilih usulan ketua OSIS karena kedudukannya lebih tinggi
- C. menghapus salah satu program agar tidak membuang waktu musyawarah
- D. menunda pengambilan keputusan hingga rapat berikutnya